

SATUAN KERJA

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA UTARA

(TW II)

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II

April - Juni 2026

Jalan Suluh No. 99 A Kel.
Sidorejo Hilir Medan
(061) 80033120

Prototype Rumah Susun Arunika 4 LT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Triwulan II Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan sumber daya pada Triwulan II Tahun Anggaran berjalan.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk komitmen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Triwulan I ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengendalian kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan, serta sebagai dasar dalam perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Dengan adanya evaluasi secara berkala, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan tersusunnya Laporan Evaluasi bulanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya **Laporan Triwulan II Tahun 2026** ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dimasa yang akan datang.

Medan, 01 Juli 2026

Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara



Muhammad Ridwan, ST, MT
NIP. 19790916 200911 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Tugas dan Fungsi.	2
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Sistematika Pelaporan.	5
BAB II	6
CAPAIAN KINERJA	6
2.1. Target Kinerja Triwulan II.	6
2.2. Capaian Target Triwulan II.	9
2.3. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan.	13
BAB III.....	17
PENUTUP.....	17
3.1. Rencana Tindak Lanjut.	17
Tabel III.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.	17
3.2. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara selaku perpanjangan tangan pusat di daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Kerja sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berupaya memenuhi pembangunan khususnya pembangunan bidang perumahan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi organisasi, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang langsung dicapai pada lingkup provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Triwulan. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi.

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara merupakan perpanjangan tangan pusat di daerah yang mempunyai tugas membantu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perdesaan, Direktorat Jenderal Perkotaan dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara turut mendukung penyelenggaraan Sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera II, yaitu :

- a) penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b) penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c) pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d) pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f) pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g) pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h) pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i) pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j) pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m) pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

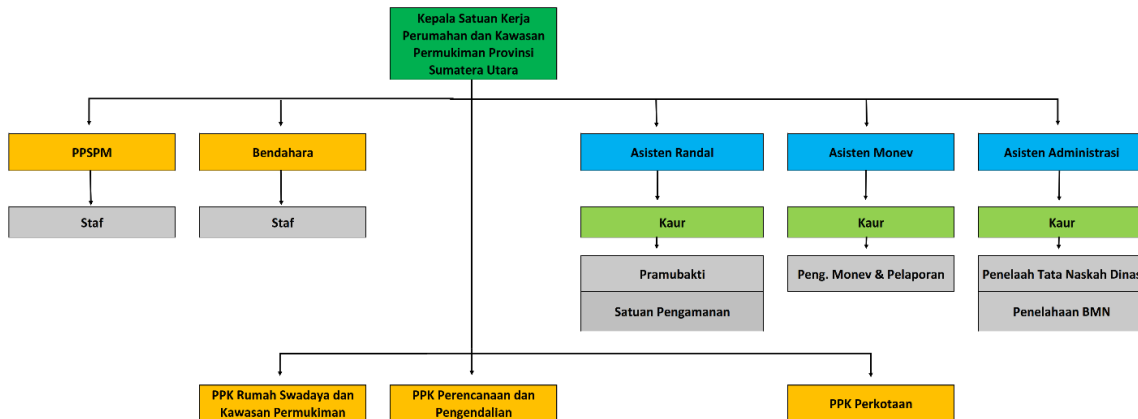
- n) pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o) pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Dasar hukum terbentuknya Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor : 194/KPTS/Sj/2025 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Tabel 1.3. Struktur Organisasi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara



1.4 Sistematika Pelaporan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum organisasi.

BAB II CAPIAN KINERJA.

Bab ini memuat capaian kinerja triwulanan dibandingkan dengan targetnya.

BAB III PENUTUP.

Bab ini memuat uraian upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB II CAPAIAN KINERJA

2.1. Target Kinerja Triwulan II.

Rencana Target Capaian Kinerja pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (April – Juni) TA 2026 Sekretariat Jenderal

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Sekretariat Jenderal**

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
1	LAYANAN UMUM	1 Laporan	S	20.953.000	20.953.000	19,88	31,58	42,55
2	OPERASIONAL, PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1 Laporan	S	468.037.000	468.037.000	33,32	41,65	49,98
3	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1 Layanan	S	206.400.000	206.400.000	33,32	41,65	58,31
4	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	1 Layanan	S	96.000.000	96.000.000	30,3	48,69	56,89
5	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	1 Laporan	AU	55.320.000	55.320.000	0	0	0
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Laporan	AU	14.872.000	14.872.000	0	0	0
7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Laporan	AU	18.360.000	18.360.000	0	0	0
TOTAL				879.942.000	879.942.000	29.32	37.99	47.48

Tabel 2.1.2 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (April – Juni) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
1	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman	50 Unit	S	50.000.000	50.000.000	0	25	100

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	S	52.642.000	52.642.000	0	0	2
3	Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	S	99.219.000	99.219.000	0	0	0
4	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	2400 Unit	S	48.000.000.000	48.000.000.000	0	3	15
5	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1 Laporan	S	4.194.903.000	4.194.903.000	5	9	15
6	Pembangunan PSU Pada Perumahan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	50 Unit	S	549.915.000	549.915.000	0	0	0
7	Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara	3 Paket	K	7.418.094.000	7.418.094.000	0	0	0
8	Biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1 Laporan	AU	183.890.000	183.890.000	0	0	0
9	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara-biaya Monev Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1 Laporan	AU	1.005.586.000	1.005.586.000	0	0	0
10	Perencanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara	6 Paket	K	3.709.047.000	3.709.047.000	0	30	50
11	Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya Provinsi Sumatera Utara	919 Unit	K	247.269.816.000	247.269.816.000	0	0	0
TOTAL				312.533.112.000	312.533.112.000	0.07	0.94	3.11

Tabel 2.1.3 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (April – Juni) TA 2026 Direktorat Jenderal Perdesaan

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perdesaan**

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
1	Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	S	37.058.000	37.058.000	0	2	12
2	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	1 Laporan	AU	24.684.000	24.684.000	33	41,3	49,6
3	Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana	540 Unit	K	19.686.600.000	19.686.600.000	0	0	0

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA	1 Laporan	S	110.796.000	110.796.000	0	0	0
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	5100 Unit	S	102.000.000.000	102.000.000.000	0	5	7,5
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	5100 Unit	S	8.368.740.000	8.368.740.000	0	5	7,8
7	Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	1 Paket	K	1.785.000.000	1.785.000.000	0	0	0
8	Perencanaan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	1 Laporan	K	118.917.000	118.917.000	0	55	100
9	Supervisi Peinngkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Laporan	K	114.000.000	114.000.000	0	0	0
10	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	AU	48.355.000	48.355.000	0	0	0
11	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	2 Laporan	K	215.000.000	215.000.000	0	0	52
12	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	1 Paket	K	8.440.000.000	8.440.000.000	0	0	0
13	Manajemen konstruksi Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan (Kabupaten Samosir)	1 Laporan	K	392.000.000	392.000.000	0	0	0
14	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	AU	331.812.000	331.812.000	0	0	0
TOTAL				141.672.962.000	141.672.962.000	0,01	3,95	6,04

Tabel 2.1.4 Rencana Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (April – Juni) TA 2026 Direktorat Jenderal Perkotaan

**RENCANA FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perkotaan**

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP	1 Laporan	S	24.320.000	24.320.000	0	0	0
2	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan pemukiman sumatera utara	1 Laporan	S	14.800.000	14.800.000	3	11	18
3	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	2400 Unit	S	53.500.000.000	53.500.000.000	0	0	8
4	PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH	1 Laporan	S	4.304.367.000	4.304.367.000	0	0	8

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
						Apr	Mei	Jun
	SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA							
5	Perencanaan / REVIU DED Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan	2 Laporan	K	250.000.000	250.000.000	0	0	58
6	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun MBR KOTA MEDAN Provinsi Sumatera Utara	1 Paket	K	12.737.400.000	12.737.400.000	0	0	0
7	MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR KOTA MEDAN	1 Paket	K	585.300.000	585.300.000	0	0	0
8	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan	1 Laporan	AU	148.500.000	148.500.000	0	2	5
	TOTAL			71.564.687.000	71.564.687.000	0.00	0.01	6.68

2.2. Capaian Target Triwulan II.

Capaian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sampai dengan akhir **Juni 2026** dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Target Pencapaian Keuangan dan Fisik Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (Juni) TA 2026 Sekretariat Jenderal

CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA Sekretariat Jenderal

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)	
							Keu	Fisik
1	LAYANAN UMUM	1 Laporan	S	20.953.000	20.953.000	20.769.365	99,12	100
2	OPERASIONAL, PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1 Laporan	S	468.037.000	468.037.000	169.723.671	36,26	40,1
3	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1 Layanan	S	206.400.000	206.400.000	18.811.282	9,11	10,23
4	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	1 Layanan	S	96.000.000	96.000.000	11.815.900	12,31	14,25
5	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	1 Laporan	AU	55.320.000	55.320.000	15.950.000	28,83	32,5
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1 Laporan	AU	14.872.000	14.872.000	14.700.000	98,84	100
7	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Laporan	AU	18.360.000	18.360.000	17.790.000	96,9	100
	TOTAL			879.942.000	879.942.000	269.560.218	30,63	33,48

Tabel 2.2.2 Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (Juni) Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)	
							Keu	Fisik
1	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Kawasan Permukiman	50 Unit	S	50.000.000	50.000.000	0	0	0
2	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	S	52.642.000	52.642.000	44.072.712	83,72	85
3	Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Lingkungan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	S	99.219.000	99.219.000	0	0	0
4	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	2400 Unit	S	48.000.000.000	48.000.000.000	16.400.000.000	34,17	0
5	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA DI KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1 Laporan	S	4.194.903.000	4.194.903.000	611.148.063	14,57	12,6
6	Pembangunan PSU Pada Perumahan Hunian di Provinsi Sumatera Utara	50 Unit	S	549.915.000	549.915.000	0	0	0
7	Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara	3 Paket	K	7.418.094.000	7.418.094.000	0	0	0
8	Biaya Money Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1 Laporan	AU	183.890.000	183.890.000	0	0	0
9	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara-biaya Money Pusat dan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera II	1 Laporan	AU	1.005.586.000	1.005.586.000	144.916.613	14,41	0
10	Perencanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat Provinsi Sumatera Utara	6 Paket	K	3.709.047.000	3.709.047.000	0	0	0
11	Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Relokasi Terpusat dan PSU Pendukungnya Provinsi Sumatera Utara	919 Unit	K	247.269.816.000	247.269.816.000	0	0	0
TOTAL				312.533.112.000	312.533.112.000	17.200.137.388	5,5	0,18

Tabel 2.2.3 Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (Juni) TA 2026 Direktorat Jenderal Perdesaan

CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perdesaan

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)	
							Keu	Fisik
1	Pemantauan dan Evaluasi	1 Laporan	S	37.058.000	37.058.000	0	0	0
2	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	1 Laporan	AU	24.684.000	24.684.000	0	0	0
3	Penyediaan Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana	540 Unit	K	19.686.600.000	19.686.600.000	0	0	0
4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UNTUK MITIGASI BENCANA	1 Laporan	S	110.796.000	110.796.000	0	0	0
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERDESAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	5100 Unit	S	102.000.000.000	102.000.000.000	11.060.000.000	10,84	4,77
6	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA	5100 Unit	S	8.368.740.000	8.368.740.000	739.406.300	8,84	8,7
7	Pembangunan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	1 Paket	K	1.785.000.000	1.785.000.000	0	0	0
8	Perencanaan Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan	1 Laporan	K	118.917.000	118.917.000	0	0	0
9	Supervisi Peinngkatan Kualitas Sanitasi Rumah	1 Laporan	K	114.000.000	114.000.000	0	0	0
10	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perdesaan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	AU	48.355.000	48.355.000	0	0	0
11	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	2 Laporan	K	215.000.000	215.000.000	99.534.588	46,3	100
12	Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan	1 Paket	K	8.440.000.000	8.440.000.000	0	0	0
13	Manajemen konstruksi Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan (Kabupaten Samosir)	1 Laporan	K	392.000.000	392.000.000	0	0	0
14	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Permukiman Kumuh Perdesaan Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	AU	331.812.000	331.812.000	16.130.000	4,86	5,6
TOTAL				141.672.962.000	141.672.962.000	11.915.070.888	8,41	4,11

Tabel 2.2.4 Target Pencapaian Keuangan Kegiatan sampai dengan Akhir Triwulan II (Juni) TA 2026 Direktorat Jenderal Perkotaan

**CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK PER KEGIATAN TA 2026
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Direktorat Jenderal Perkotaan**

No.	Nama Paket	Output	Jenis Pengadaan	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)	
							Keu	Fisik
1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PP	1 Laporan	S	24.320.000	24.320.000	0	0	0
2	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan kawasan permukiman Sumatera utara	1 Laporan	S	14.800.000	14.800.000	0	0	0
3	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	2400 Unit	S	53.500.000.000	53.500.000.000	5.580.000.000	10,43	8,77
4	PENGAWASAN PENGENDALIAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA DI PERKOTAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	1 Laporan	S	4.304.367.000	4.304.367.000	328.581.805	7,63	10,32
5	Perencanaan / REVIU DED Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan	2 Laporan	K	250.000.000	250.000.000	197.805.552	79,12	100
6	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Susun MBR KOTA MEDAN Provinsi Sumatera Utara	1 Paket	K	12.737.400.000	12.737.400.000	0	0	0
7	MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN MBR KOTA MEDAN	1 Paket	K	585.300.000	585.300.000	0	0	0
8	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja Perkotaan	1 Laporan	AU	148.500.000	148.500.000	52.886.605	35,61	36,2
TOTAL				71.564.687.000	71.564.687.000	6.159.273.962	8,61	7,6

2.3. Permasalahan dan Faktor Keberhasilan.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Faktor Keberhasilan
1	Rumah Swadaya	Tahap Verifikasi : - Data tidak lengkap - Kelayakan tidak sesuai. - Dokumen tidak valid	- Koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan calon penerima bantuan dalam melengkapi data.. - Dilakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi rumah dan calon penerima sesuai dengan data yang diajukan. - Seluruh dokumen diverifikasi keaslian, kesesuaian, dan masa berlakunya dengan instansi yang berwenang apabila diperlukan.
		Tahap Penyusunan Laporan. - Data yang digunakan untuk menyusun proposal tidak akurat atau tidak lengkap. - Kriteria yang digunakan untuk menyusun proposal tidak sesuai dengan pedoman BSPS. - Anggaran yang diusulkan tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan. - Teknis pelaksanaan tidak jelas atau	- Dilaksanakannya survei dan validasi data secara menyeluruh sebelum penyusunan proposal. - Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, tenaga pendamping, dan pihak terkait dalam penyediaan data. - Penggunaan format dan instrumen pendataan sesuai pedoman BSPS. - Seluruh penyusun proposal memahami dan mengacu pada pedoman teknis BSPS yang berlaku. - Perhitungan volume pekerjaan dilakukan

No.	Kegiatan	Permasalahan	Faktor Keberhasilan
		tidak sesuai dengan pedoman BSPS	secara akurat sesuai hasil survei teknis. - Melibatkan tenaga teknis yang kompeten dalam penyusunan anggaran. - Dilakukan evaluasi kewajaran biaya sebelum proposal disampaikan. - Metode pelaksanaan disusun secara rinci dan mengacu pada pedoman teknis BSPS. - Spesifikasi teknis dan gambar rencana telah memenuhi standar yang ditetapkan.
		Tahap Pelaksanaan: - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB). - Pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai kaidah konstruksi program BSPS - Proses pengadaan material melalui toko/penyedia mengalami keterlambatan - Harga material fluktuatif sehingga memengaruhi kesesuaian anggaran - Lokasi rumah sulit diakses kendaraan pengangkut material.	- Dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan secara cepat. - Adanya komitmen dan partisipasi aktif seluruh anggota KPB dalam pelaksanaan Pembangunan. - Toko/penyedia memiliki kapasitas pasokan yang memadai dan mampu memenuhi jadwal pengiriman. - Jadwal pengadaan material disusun sejak awal pelaksanaan dan disesuaikan dengan progres pekerjaan. - Tersedia alternatif penyedia material apabila terjadi kendala pasokan. - Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Kegiatan	Permasalahan	Faktor Keberhasilan
			menggunakan harga pasar terkini dan mempertimbangkan potensi fluktuasi harga. - Pengadaan material dilakukan sedini mungkin untuk mengurangi risiko kenaikan harga. - Dilakukan survei akses lokasi sebelum pelaksanaan untuk menentukan metode distribusi material yang paling efektif. - Disusun rencana logistik dan jadwal pengiriman material yang sesuai dengan kondisi lapangan. - Koordinasi yang baik dengan pemerintah desa, masyarakat setempat, dan penyedia material untuk mendukung kelancaran distribusi.
2	Rumah Susun	Pengadaan dengan system e purchasing belum dapat dilaksanakan karena item dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada di market place terutama pada jenis pondasi, dimana pondasi yang diminta pada pelaksanaan Rumah Susun Kota Medan menggunakan type spun pile sedangkan yang tersedia type mini pile.	Telah dilaksanakan dokumen pengadaan apabila dilaksanakan pengadaan dilaksanakan secara tender, PPK telah siap untuk melaksanakan.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Faktor Keberhasilan
3	Rumah Khusus	Lahan untuk relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan belum clean and clear, dikarenakan lahan tersebut masih milik warga belum diserahkan kepada Pemkab	Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kelengkapan data clean and clear.

BAB III PENUTUP

3.1. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1	Rumah Swadaya	Tahap Verifikasi : - Data tidak lengkap - Kelayakan tidak sesuai. - Dokumen tidak valid	- Verifikasi Ulang - Pengawasan lapangan. - Komunikasi dengan CPB untuk melengkapi data dan dokumen yang lengkap - Membuat laporan verifikasi yang menyatakan kebenaran data dan dokumen.
		Tahap Penyusunan Laporan. - Data yang digunakan untuk menyusun proposal tidak akurat atau tidak lengkap. - Kriteria yang digunakan untuk menyusun proposal tidak sesuai dengan pedoman BSPS. - Anggaran yang diusulkan tidak realistis atau tidak sesuai dengan kebutuhan.	- Memeriksa dan memperbarui data sebelum menyusun proposal. - Memastikan kriteria yang digunakan sesuai dengan pedoman BSPS. - Memeriksa dan merevisi anggaran untuk memastikan kesesuaiannya. - Memastikan teknis pelaksanaan jelas dan sesuai dengan pedoman BSPS

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		- Teknis pelaksanaan tidak jelas atau tidak sesuai dengan pedoman BSPS	
		Tahap Pelaksanaan: - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB). - Pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai kaidah konstruksi program BSPS - Proses pengadaan material melalui toko/penyedia mengalami keterlambatan - Harga material fluktuatif sehingga memengaruhi kesesuaian anggaran - Lokasi rumah sulit diakses kendaraan pengangkut material.	- Melakukan asistensi teknis dan pengecekan berkala oleh Tim Pendamping Provinsi. - Memberikan bimbingan teknis kepada tukang dan memfasilitasi konsultasi teknis di lapangan. - Mengadakan koordinasi dengan toko penyedia untuk memastikan komitmen pengiriman dan ketersediaan stok. - Mengusulkan alternatif material sesuai standar teknis apabila stok utama tidak tersedia. - Melakukan penyesuaian rencana pembelian material sesuai prioritas kebutuhan pembangunan
2	Rumah Susun	Pengadaan dengan system e purchasing belum dapat dilaksanakan karena item dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan yang ada di market place terutama pada jenis pondasi, dimana pondasi yang diminta pada	Berkoordinasi dengan Dirjen TKPR terhadap resiko yang akan timbul apabila dilaksanakan secara e purchasing, dan meminta pendapat dan arahan agar pelaksanaan pengadaan dengan system Lelang.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		pelaksanaan Rumah Susun Kota Medan menggunakan type spun pile sedangkan yang tersedia type mini pile.	
3	Rumah Khusus	Lahan untuk relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan belum clean and clear, dikarenakan lahan tersebut masih milik warga belum diserahkan kepada Pemkab	Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam untuk kesiapan lahan agar clean and clear.

3.2. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.

Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Permasalahan	Upaya Yang Telah Dilaksanakan	Tindak Lanjut
1	Rumah Swadaya	Belum tersedianya alokasi anggaran	Telah Melaksanakan perekrutan TFL, dan telah terbitnya alokasi	Selesai
2	Rumah Susun	Belum tersedianya alokasi anggaran	Telah berkoordinasi dengan Unor teknis dan pelaksanaan sudah menyelesaikan pelaksanaan reviu DED	Selesai
3	Rumah Khusus	Belum tersedianya alokasi anggaran dalam pelaksanaan	Berkoordinasi dengan pusat untuk kesiapan lahan, jumlah unit yang	Selesai.

No.	Kegiatan	Permasalahan	Upaya Yang Telah Dilaksanakan	Tindak Lanjut
		Hunian Tetap korban bencana	akan dilaksanakan dan prioritas utama daerah yang akan dilaksanakan dan saat ini sudah melaksanakan persiapan dokumen Lelang Konsultan Pengawasan Konstruksi	